

Judul : Kualitas Wakil Rakyat dan Kepercayaan Publik
Tanggal : Senin, 07 Oktober 2019
Surat Kabar : Suara Pembaruan
Halaman : 1-17

Kualitas Wakil Rakyat dan Kepercayaan Publik

Lembaga Survei Indonesia (LSI) belum lama ini merilis hasil survei terkait kepercayaan publik terhadap kinerja presiden, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hasilnya menunjukkan mayoritas warga lebih percaya terhadap kinerja KPK dan Presiden Joko Widodo daripada kinerja DPR.

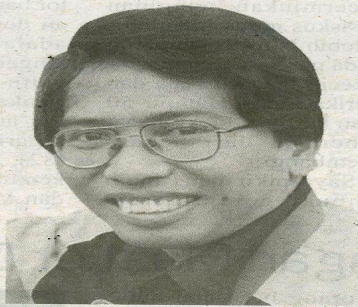
Berdasar survei LSI, yang percaya pada KPK sebesar 72%, sementara yang percaya pada Presiden Joko Widodo sebesar 71%, sedangkan yang percaya pada DPR hanya sekitar 40%.

Survei LSI tersebut dilakukan dengan metode wawancara menggunakan telepon pada 4 hingga 5 Oktober 2019. Responden dalam survei ini dipilih secara acak dari responden survei nasional LSI sebelumnya, yakni survei pada Desember 2018, dan September 2019, yang jumlahnya 23.760 orang.

Dari total responden yang memiliki telepon, LSI kemudian memilih sampel secara *stratified random sampling*. Total yang ditelepon secara acak sebanyak 4.308 orang, dan yang berhasil diwawancarai sebanyak 1.010 orang. Toleransi kesalahan survei diperkirakan lebih kurang 3,2% pada tingkat kepercayaan 95%.

Terbawah

Apa yang dihasilkan dari survei LSI tersebut bukan hal mengejutkan. Pasalnya, jajak pendapat di banyak negara demokrasi nyaris senantiasa menempatkan politisi hampir di urutan terbawah dalam hal kepercayaan publik. Kenapa? Joel Hirschhorn (2008) menyatakan, sebagian besar politisi memiliki satu kesamaan: cenderung kurang jujur. Menurutnya, mayoritas politisi sulit untuk jujur ihwal apa yang dikatakannya dan dilaku-



DJOKO SUBINARTO

kaninya.

Sementara Philip Dorell (2006) menyebutkan bahwa politisi memiliki kecenderungan untuk membual dan terus membual, apalagi jika sampai pada soal melindungi kepentingan pribadi mereka.

Kita semua pasti sepakat, yang namanya wakil rakyat sudah seharusnya menyuarakan dan membela kepentingan rakyat. Mereka seharusnya memegang prinsip *pro bono publico* alias demi kepentingan publik.

Artinya, kepentingan publik harus dinomorsatukan di atas kepentingan pribadi dan golongan. Bukan malah sebaliknya, menyuarakan dan membela kepentingan pribadi serta golongan, dan melakukan berbagai upaya agar kepentingan pribadi serta golongan itu senantiasa terpenuhi, sementara kepentingan publik ditempatkan entah di urutan ke berapa.

Akibatnya tidak sedikit masyarakat sekarang ini menunjukkan sikap kian sinis terhadap perilaku sebagian besar wakil rakyat yang katanya mulia serta terhormat itu. Di mata sebagian rakyat, para wakil rakyat boleh jadi meru-

pakan sosok orang-orang yang tidak pernah bisa mereka percayai secara sungguh-sungguh.

Persepsi buruk semacam itu mungkin saja dipengaruhi oleh sikap kebanyakan wakil rakyat kita yang sejauh ini tidak jarang mengundang reaksi miring dari publik. Pasalnya, masih banyak sepak terjang mereka yang lebih mengedepankan ego dan kepentingan pribadi serta golongan ketimbang kepentingan publik luas yang sesungguhnya harus mereka perjuangkan terus-menerus.

Di mata sebagian orang, sangat boleh jadi para wakil rakyat kita selama ini dipersepsikan sebagai kelompok yang cenderung haus akan kekuasaan serta uang. Tidak lebih dari itu. Dengan demikian, motif utama mereka untuk menjadi wakil rakyat diyakini lebih ke soal kekuasaan dan fulus.

Rainer Adam (2004) pernah menyatakan bahwa di Indonesia uang menjadi pendorong utama untuk terjun di dunia politik. Menurutnya, para politisi berupaya menarik keuntungan-keuntungan dari tender publik, pembuatan undang-undang, dan peraturan yang menguntungkan orang-orang, perusahaan atau sektor tertentu.

Padahal, menurutnya, di kebanyakan negara yang demokrasi-nya sudah berkembang, anggota parlemen tidak menerima gaji atau honor untuk tugas mereka sebagai anggota legislatif. "Di sana, bekerja sebagai anggota dewan dianggap sebagai kerja sukarela untuk kepentingan rakyat," tulis Rainer Adam.

Dengan kecenderungan seperti itu, maka tak perlu heran apabila yang lahir kemudian adalah sebuah alam demokrasi yang berkualitas rendah (*low democracy*).

Bersambung ke halaman 17

Kualitas Wakil Rakyat... sambungan dari halaman 16

Buntutnya, kepercayaan publik kepada para wakil rakyat pun menjadi rendah pula. Demokrasi yang berkualitas rendah menjadikan kegiatan politik yang mestinya berbuah pada terciptanya kesejahteraan dan kemakmuran bagi segenap rakyat, akhirnya hanya menelurkan kesejahteraan dan kemakmuran pada segelintir kelompok masyarakat saja (elite).

Politik pada akhirnya menjadi soal mata pencaharian dan bukan soal pengabdian. Padahal, sejatinya, politik adalah ideologi yang harus diperjuangkan terus-menerus. Namun, faktanya, fulusiologi (uang) dan kursiologi (kekuasaan) menjadi jauh lebih menonjol dalam melatarbelakangi seseorang untuk berkiprah di jagat politik negeri ini ketimbang idealisme dan pengabdian.

Negarawan

Karena umumnya lebih banyak politisi yang cenderung bekerja demi kepentingan-kepentingan pribadi mereka, maka, kita sesungguhnya memerlukan jauh lebih sedikit politisi dan memerlukan jauh lebih banyak negarawan. Pertanyaannya ke-

mudian apa perbedaan antara politisi dan negarawan? Reed & Folsom (2005) membedakan keduanya sebagai berikut.

Pertama, politisi mencari jabatan dan kekuasaan untuk mendapat-

kan rakyat. Mereka benar-benar menjadi corong rakyat dan memperjuangkan kepentingan-kepentingan rakyat. Adapun politisi, begitu mereka terpilih dalam pemilu, kecenderungannya adalah segera melupa-

dak akan mengobral janji-janji yang tidak bisa ditepati atau janji-janji yang nantinya justru akan mereka langgar, sedangkan politisi lebih senang mengumbar janji-janji manis dan muluk yang kemungkinan besar

Kelima, negarawan adalah orang-orang yang konsisten, jujur dan amanah, sedangkan politisi cenderung *plin-plan*, tidak jujur dan tidak amanah.

Dari negarawan kita akan banyak mendapatkan pelajaran tentang berbagai kebaikan, sedangkan dari politisi kita lebih sering mendapat janji-janji kosong. Tat kala politisi meninggalkan jabatannya, kita akan mudah melupakannya, namun tat kala negarawan meninggalkan jabatannya kita akan sangat kehilangan dan merindukannya.

Atas dasar apa yang dikemukakan Reed & Folsom tersebut, kita tentu sangat berharap para wakil rakyat yang mulia dan terhormat itu, khususnya yang telah terpilih untuk masa jabatan periode 2019-2024, agar lebih mampu mengedepankan spirit kenegarawanan ketimbang mengedepankan spirit kepolitisian mereka. Dengan begitu, kepercayaan publik negeri ini terhadap mereka bakal lebih meningkat.

PENULIS ADALAH KOLUMNIS
DAN ALUMNUS FISIP
UNIVERSITAS PADJADJARAN

Masyarakat sekarang ini menunjukkan sikap kian sinis terhadap perilaku sebagian besar wakil rakyat kita yang katanya mulia serta terhormat. Namun, di mata sebagian rakyat, para wakil rakyat boleh jadi merupakan sosok orang-orang yang tidak pernah bisa mereka percayai secara sungguh-sungguh.

kan keuntungan-keuntungan pribadi, sedangkan negarawan tidak pernah mencari jabatan dan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan pribadi melainkan semata-mata untuk melayani publik.

Kedua, ketika telah terpilih dalam pemilu, negarawan tidak akan pernah melupakan dan meninggal-

kan dan meninggalkan rakyat sekaligus menjadi corong partai, dan akan sekuat tenaga memperjuangkan kepentingan-kepentingan pribadi dan kelompok mereka.

Ketiga, negarawan akan jauh lebih besar kemungkinannya mengedepankan apa-apa yang benar dan menjadi hak-hak rakyat. Mereka ti-

tidak pernah bisa mereka penuhi atau mengapungkan janji-janji yang kelak malah mereka langgar sendiri.

Keempat, tat kala harus menggunakan anggaran publik, negarawan akan menggunakannya seminim dan seefisien mungkin, sedangkan politisi akan cenderung menghambur-hamburkan anggaran publik itu.